



BISMA
Business and Management Journal

BISMA

Business and Management Journal

Volume 04 Nomor 02 Tahun 2026

E-ISSN : 2987-5900

DOI : 10.59966/bisma.v4i2.2579

Logika Religius-Komunal di Ceruk Syariah: Platform Transportasi Daring dan Tata Kelola Tenaga Kerja Muslim di Indonesia

Bobby Ferly¹, Muchlis Bahar², Zainal Azwar³

Imam Syafii Islamic Institute (IMSYA) of Indonesia¹

Imam Bonjol State Islamic University, Padang, Indonesia^{2,3}

ferlybobby@gmail.com¹, muchlisbahar@uinib.ac.id², zainalazwar@uinib.ac.id³

Diserahkan tanggal 18 April 2026 | Diterima tanggal 26 Juni 2026 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2026

Abstract:

This article examines how digital platforms organize Muslim gig labor in Indonesia amid competing market, corporate, and religious logics, and evaluates their organizational design through the lens of maqāṣid al-sharīʿah. Reframing the question from whether the gig economy is permissible toward how platform labor is actually governed within religious regulation, the study employs qualitative content analysis of credible Indonesian media reporting from 2024 to 2025, together with policy and platform documents. A three-family coding framework, derived from algorithmic human resource management, maqāṣid, and work-identity theory, guided the analysis. Findings show that mainstream platform governance is dominated by algorithmic fee structures and partnership framing that drivers contest through sustained collective action, reflecting an unresolved tension between market and corporate logics. A religious-communal logic is empirically present but segregated into sharia platforms such as Zendo, Ojesy, and Shejek rather than integrated into dominant players. Maqāṣid evaluation indicates that protection of property is most eroded, while collective agency predominates and loyalty appears as a discursive construction. The study refines institutional-logics theory by theorizing religious regulation as a third, currently segregated logic.

Keywords: Gig Economy, Algorithmic HRM, Maqāṣid Al-Sharīʿah, Platform Governance, Indonesia.

Abstrak :

Artikel ini mengkaji bagaimana platform digital di Indonesia mengorganisir tenaga kerja gig Muslim di tengah tarikan logika pasar, korporasi, dan religius, serta menilai desain organisasinya melalui lensa maqāṣid al-sharīʿah. Dengan menggeser pertanyaan dari apakah ekonomi gig dibenarkan menuju bagaimana kerja platform sesungguhnya ditata kelola di dalam kerangka regulasi religius, penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif atas pemberitaan media Indonesia yang kredibel sepanjang 2024–2025 bersama dokumen kebijakan dan platform. Analisis dipandu kerangka koding tiga keluarga yang diturunkan dari manajemen sumber daya manusia algoritmik, maqāṣid, dan teori identitas kerja. Temuan menunjukkan tata kelola platform arus utama didominasi struktur biaya algoritmik dan pembingkai "kemitraan" yang dikontestasi pengemudi melalui aksi kolektif berkelanjutan, mencerminkan ketegangan tidak terselesaikan antara logika pasar dan korporasi. Logika religius-komunal hadir secara empiris tetapi tersegregasi ke platform syariah seperti Zendo, Ojesy, dan Shejek alih-alih terintegrasi pada pemain dominan. Evaluasi maqāṣid menunjukkan perlindungan harta paling terkikis, agensi kolektif paling menonjol, dan loyalitas hadir sebagai konstruksi diskursif. Penelitian ini memperhalus teori logika institusional dengan menteorikan regulasi religius sebagai logika ketiga yang kini tersegregasi.

Kata Kunci: Ekonomi Gig, HRM Algoritmik, Maqāṣid Al-Sharīʿah, Tata Kelola Platform, Indonesia.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Ekonomi gig telah menjadi salah satu penopang penyerapan tenaga kerja Indonesia, namun pertumbuhannya berjalan mendahului kerangka hukum dan organisasional yang menaunginya. Studi pengukuran menunjukkan kehadiran pekerja gig yang signifikan dan tersebar, dengan konsentrasi terbesar pada layanan transportasi daring (Permana et al., 2023). Masalah muncul dari konstruksi relasi yang dipakai platform: pengemudi diposisikan sebagai "mitra", bukan pekerja, sehingga berada di luar jangkauan undang-undang ketenagakerjaan dan kehilangan akses pada upah minimum, jaminan sosial, serta perlindungan dari pemutusan sepihak. Kerentanan struktural semacam ini adalah ciri prekariat kelas yang ditandai ketidakamanan kronis (Standing, 2011) Yang sering luput dari analisis arus utama adalah bahwa mayoritas pekerja gig Indonesia adalah Muslim, sehingga persoalan keadilan ketenagakerjaan beririsan langsung dengan kerangka etis Islam, khususnya perlindungan lima keniscayaan maqāṣid al-sharī'ah (Ishak et al., 2025). Persoalannya menjadi mendesak karena navigasi atas kepatuhan ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan praktik yang sedang berlangsung: platform besar kini aktif merancang program kesejahteraan dan kepatuhan yang menyentuh dimensi religius pekerjaannya namun bagaimana sesungguhnya platform mengorganisir tenaga kerja gig di dalam kerangka regulasi religius belum dipahami secara memadai.

Tiga arus literatur menyentuh persoalan ini namun nyaris tidak berpotongan. Arus pertama, manajemen platform dan algoritmik, telah mapan: HRM di ekonomi gig dipahami sebagai tata kelola ekosistem alih-alih hubungan kerja, dengan kontrol algoritmik yang melibatkan banyak aktor termasuk pelanggan (Meijerink & Keegan, 2019) (Duggan et al., 2023), serta ketegangan antara logika pasar dan logika korporasi dalam praktik HRM (McDonnell et al., 2021), di mana algoritma menjadi medan kontrol yang diperebutkan (Kellogg et al., 2020). Namun arus ini hampir seluruhnya dikembangkan dalam konteks Global Utara dan belum diuji pada persilangan dengan regulasi religius. Arus kedua, evaluasi maqāṣid atas kerja gig, memetakan tantangan pekerja ke lima keniscayaan, tetapi bersifat normatif-evaluatif, sebagian besar konseptual, dan bertanya "apakah selaras syariah" alih-alih "bagaimana kerja diorganisir" (Ishak et al., 2025). Arus ketiga, kajian empirik gig Indonesia, didominasi sudut perlindungan hukum dan pengalaman pekerja termasuk pemetaan agensi pekerja di tengah keprekariatan (Permana et al., 2026) sementara desain strategis-manajerial platform nyaris tak tersentuh. Ketiga arus berjalan paralel; tidak ada yang mengintegrasikan desain organisasi, lensa evaluatif maqāṣid, dan konteks platform Indonesia berpenduduk mayoritas Muslim.

Di titik konvergensi yang kosong itulah letak kebaruan penelitian ini. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa regulasi dan identitas religius di Indonesia dapat diteorikan sebagai *logika institusional ketiga* logika religius-komunal yang ditumpangkan pada ketegangan klasik antara logika pasar dan logika korporasi (McDonnell et al., 2021). Dengan kerangka ini, pertanyaan penelitian bergeser dari penilaian normatif ("apakah ekonomi gig halal atau adil") menuju analisis praktik organisasional ("bagaimana manajer mengorganisir tenaga kerja gig di dalam kerangka regulasi religius"). Pergeseran ini penting secara teoretis karena menguji keteralihan kerangka HRM-ekosistem dan logika institusional yang lahir di Barat pada setting religius non-Barat, sekaligus berpotensi memperluas konsep *holding environment* identitas kerja prekariat ke register religius (Petriglieri et al., 2019). Tesisnya: identitas keislaman tidak netral terhadap desain organisasi platform, melainkan turut membentuk bagaimana kontrol algoritmik dialami, diwacanakan, dan direvisi oleh pekerja (Cameron & Rahman, 2022).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana platform digital di Indonesia mengorganisir, mengelola, dan memberi makna pada tenaga kerja gig Muslim di tengah tarikan logika pasar, korporasi, dan religius, serta menilai melalui lensa maqāṣid sejauh mana desain organisasi tersebut melindungi atau mengikis kelima keniscayaan pokok pekerja. Untuk itu digunakan pendekatan kualitatif-interpretif dengan desain multi-sumber. Lapis pertama adalah

analisis dokumen atas regulasi ketenagakerjaan, fatwa, serta artefak kebijakan platform (syarat-ketentuan kemitraan, pengumuman kesejahteraan), dianalisis melalui *content analysis* dengan kerangka coding yang diturunkan langsung dari konstruk teoretis (Krippendorff, 2018) (Auda, 2008a). Lapis kedua adalah netnografi atas wacana komunitas pekerja daring untuk menangkap konstruksi keadilan, kepuasan, dan loyalitas. Kedua lapis ditriangulasi untuk menguji apakah klaim platform tentang keadilan dan kesejahteraan selaras dengan wacana pekerja, sehingga ketidaksesuaian antar-lapis justru menjadi temuan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretif dengan desain analisis isi atas pemberitaan media dan dokumen kebijakan. Desain ini menggantikan rencana netnografi komunitas pekerja karena pertanyaan penelitian, pada tahap ini, dijawab melalui dua lapis tekstual yang tersedia secara publik: lapis tata kelola organisasi-regulatif yang terekam dalam artefak resmi dan, sekaligus, lapis wacana publik atas pengalaman pekerja yang terekam dalam pemberitaan media arus utama. Analisis isi dipilih karena menyediakan kerangka sistematis untuk membaca makna yang tampak (manifest) maupun laten dari korpus teks secara replikabel (Krippendorff, 2018) (Eriyanto, 2011), sementara pengodean kualitatif memungkinkan penurunan konstruk teoretis menjadi kategori analitis yang tertelusur (Saldaña, 2016). Pembacaan kualitatif atas konten media dalam konteks Indonesia telah menunjukkan kelayakannya pada beragam studi komunikasi (Prajarto, 2018) (Permassanty & Muntiani, 2018).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama, sehingga posisinya perlu dinyatakan eksplisit. Peneliti menempatkan diri sebagai penafsir korpus media membaca, mengategorikan, dan menafsirkan teks pemberitaan dan dokumen tanpa terlibat dalam peristiwa yang diberitakan dengan menjaga reflektivitas atas setiap keputusan tafsir agar bias praanggapan dapat dilacak dan dikoreksi. Karena data berasal dari teks yang sudah dipublikasikan, fokus imersi peneliti adalah pemahaman konteks pemberitaan, bukan partisipasi lapangan.

Target penelitian, populasi, dan sampel ditetapkan secara purposif demi memperoleh kasus yang kaya informasi. Korpus penelitian terdiri atas dua belas (12) item yang dihimpun secara purposif dari dua himpunan. Himpunan pertama adalah sepuluh (10) artikel pemberitaan dari delapan (8) outlet media daring yang dapat diverifikasi, yaitu CNN Indonesia, Tempo (dua artikel), Kompas TV, Kompas.com, Berita Jatim, Kalsel Pos, dan Radar Solo/Jawa Pos, yang mencakup rentang waktu 2024–2026 sebagai jendela analisis utama. Dua artikel dari Kumparan (2019) dan Tirto.id (2018) disertakan sebagai item kontekstual historis untuk menelusuri kemunculan dan karakteristik awal platform syariah, sehingga perubahan desain organisasi platform dapat dipetakan secara terbatas lintas waktu. Himpunan kedua adalah dua (2) dokumen regulasi, yaitu Kepmenhub KP 1001/2022 dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Platform yang menjadi subjek analisis berjumlah lima (5): dua platform arus utama (Grab dan Maxim) dan tiga platform berbasis nilai syariah (Zendo, Ojesy, dan Shejek).

Korpus terdiri atas dua himpunan. Himpunan pertama adalah pemberitaan media daring kredibel sepanjang 2024–2025 mengenai tata kelola, kesejahteraan, dan kepatuhan platform transportasi daring serta dimensi religiusnya, dengan kriteria inklusi: dimuat oleh media yang dapat diverifikasi, memuat substansi mengenai rekrutmen, benefit, kontrol kinerja/algorithmik, keadilan, atau nilai religius, dan dapat ditelusuri tautannya. Himpunan kedua adalah dokumen: regulasi ketenagakerjaan dan transportasi, fatwa atau pernyataan lembaga keagamaan, syarat-ketentuan kemitraan, serta pengumuman program kesejahteraan dan kepatuhan platform. Lokasi penelitian, dengan demikian, adalah korpus media dan dokumen tersebut, sedangkan lama penelitian mencakup rentang penerbitan 2024–2025 beserta jendela penelusuran yang ditetapkan dan dilaporkan; penghimpunan dihentikan ketika tercapai kejenuhan tema, yaitu saat item baru tidak lagi memunculkan kategori baru (Krippendorff, 2018).

Pengembangan instrumen dan pengolahan data berpusat pada lembar koding yang diturunkan langsung dari konstruk teoretis. Instrumen disusun secara deduktif dengan tiga keluarga kode penanda tata kelola dan logika institusional, evaluasi kelima keniscayaan maqāṣid, serta konstruksi identitas, keadilan, dan agensi pekerja dan tetap menyediakan ruang induktif bagi tema yang tak terantisipasi (Auda, 2008a) (Ishak et al., 2025) (McDonnell et al., 2021). Unit analisis adalah satu item berita, satu pernyataan kebijakan, atau segmen bermakna di dalamnya. Data mentah diolah melalui tahapan lazim analisis isi: pengumpulan dan pembersihan teks, verifikasi sumber, penetapan unit analisis, parafrasa serta penyamaran identitas individu yang disebut dalam pemberitaan untuk meminimalkan pelacakan balik, lalu pencatatan ke dalam lembar koding yang memuat definisi, indikator, dan aturan pemberian kode (Eriyanto, 2011) (Saldaña, 2016).

Teknik analisis data adalah analisis isi kualitatif yang dilengkapi pencatatan valensi dan ko-okurensi. Setiap unit dapat menerima lebih dari satu kode lintas keluarga, dan ko-okurensi antar-kode misalnya keluhan kelayakan pendapatan yang berdampingan dengan pembungkahan nilai religius diperlakukan sebagai temuan analitis, bukan gangguan, lalu didokumentasikan melalui memo analitis (Krippendorff, 2018) (Saldaña, 2016). Hasil koding kemudian ditriangulasi pada dua arah: antar-media untuk menguji konsistensi pemberitaan, dan antara wacana media dengan dokumen kebijakan, sehingga ketidaksesuaian antara klaim platform dan pemberitaan atas pengalaman pekerja justru menjadi sumber temuan. Pemanfaatan pembacaan kualitatif atas konten media untuk memahami pemaknaan telah terbukti layak dalam riset Indonesia (Irwanto & Hariatiningsih, 2020).

Keabsahan hasil dijaga melalui beberapa cara. Kredibilitas diperkuat dengan triangulasi antar-sumber; reliabilitas koding dijaga melalui kesepakatan antar-koder pada sebagian data bila tersedia dua koder, atau melalui jejak audit koding yang terdokumentasi dan pengodean ulang sebagian data setelah jeda bila peneliti bekerja tunggal (Eriyanto, 2011) (Krippendorff, 2018). Dependabilitas dan konfirmabilitas ditopang catatan reflektif atas keputusan tafsir. Karena data bersumber dari teks publik, dimensi etika difokuskan pada penyebutan individu: peneliti memparafrasa alih-alih mengutip panjang, menghormati hak cipta sumber, dan berhati-hati terhadap penyebutan nama dalam pemberitaan. Akhirnya, batas desain ini diakui secara jujur: analisis isi pemberitaan menangkap dengan baik lapis kebijakan, regulasi, dan wacana publik, tetapi lemah menangkap pemaknaan batin pekerja khususnya konstruksi identitas religius dan fungsi komunitas sebagai penopang sehingga klaim pada ranah itu dibatasi, dan netnografi komunitas pengemudi direkomendasikan sebagai kelanjutan untuk melengkapinya.

PEMBAHASAN

Tata Kelola Kerja Gig dan Tarikan Tiga Logika Institusional

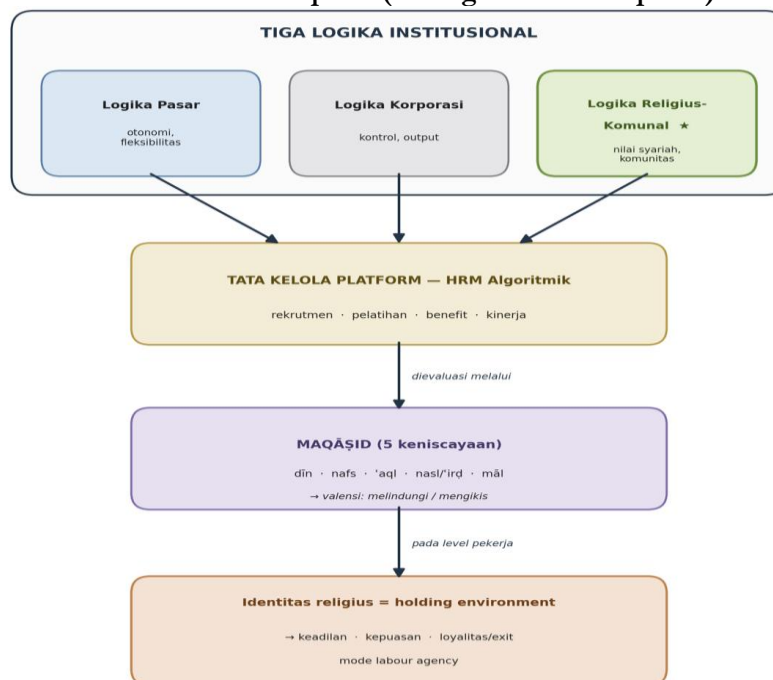
Berdasarkan analisis korpus, tata kelola kerja gig di Indonesia memperlihatkan interaksi tiga logika institusional, yaitu logika pasar, logika korporasi, dan logika religius-komunal, yang bersama-sama membentuk praktik HRM algoritmik sebagaimana dirumuskan dalam kerangka analisis a priori (Gambar 1). Pada level operasional, tata kelola tersebut didominasi oleh struktur biaya algoritmik dan pembungkahan hubungan kerja sebagai "kemitraan" (CNN Indonesia, 2025), yang pada saat yang sama dikontestasi secara kuat oleh para pengemudi (lihat Tabel 1). Praktik yang paling menonjol adalah kompensasi/potongan (A3), manajemen biaya-kinerja algoritmik (A4), dan benefit/jaminan sosial (A5). Temuan ini menunjukkan bahwa logika korporasi yang berorientasi pada kontrol dan output beroperasi melalui mekanisme algoritmik, sementara logika pasar tercermin pada penekanan terhadap efisiensi biaya dan fleksibilitas kerja, serta logika religius-komunal muncul sebagai kerangka normatif yang menegosiasikan praktik tersebut melalui nilai-nilai syariah dan komunitas. Pola ini menegaskan bahwa HRM platform berfungsi sebagai mekanisme tata kelola ekosistem, alih-alih sekadar mengatur hubungan kerja (Meijerink & Keegan, 2019), dengan kontrol yang dijalankan melalui mekanisme algoritmik (Duggan et al.,

2023). Selanjutnya, praktik tata kelola tersebut dievaluasi menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai sejauh mana mekanisme HRM algoritmik mendukung atau mengikis lima dimensi kemaslahatan pekerja, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap pembentukan identitas religius, persepsi keadilan, loyalitas, dan kapasitas labour agency sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Tabel 1.
Frekuensi kemunculan kode

Kode	n (dari 12)	Catatan
A3 Kompensasi/potongan	8	erosi pendapatan dominan
A4 Kinerja/biaya algoritmik	5	potongan, alokasi order, banding
A5 Benefit/jaminan sosial	5	THR, asuransi, BPJS (Perpres)
A6 Logika pasar	3	retorika "mitra/fleksibel"
A7 Logika korporasi	3	standar wajib, deaktivasi
A8 Logika religius-komunal	4	hanya platform syariah
A1 Rekrutmen	4	kriteria religius (syariah)
A2 Pelatihan	0	tak teramati di media
B5 māl	7	mengikis (6) / melindungi (1)
B2 nafs	3	kondisi tak layak; asuransi
B4 nasl/'ird	3	banding lemah; keamanan perempuan
B1 dīn	3	hanya ceruk syariah
B3 'aql	3	transparansi rendah
C1 keadilan	5	distributif + prosedural
C2 (ketidak)puasan	2	mayoritas ketidakpuasan
C3 loyalitas/exit	2	tipis (diskursif)
C4 identitas religius pekerja	2	tipis (motif driver syariah)
C5 holding environment religius	0-1	tak teramati butuh netnografi
C6 mode agency kolektif	5	dominan (demo, off-bid, serikat)

Gambar 1.
Model konseptual (kerangka analisis a priori)



Logika Pasar dan Korporasi dalam Praktik HRM Algoritmik

Kepmenhub KP 1001/2022 membatasi potongan aplikasi maksimal 20%, tetapi pengemudi dan serikat melaporkan potongan riil 50–70% (Tempo, 2025b). SPAI mencontohkan pengemudi menerima Rp5.200 dari order makanan senilai Rp18.000. Di sisi lain, aplikator membingkai potongan sebagai pembiayaan teknologi, asuransi, dan bantuan operasional retorika otonomi-fleksibilitas "mitra" atau logika pasar yang berjalan bersama kontrol berstandar dan deaktivasi (logika korporasi). Ketegangan dua logika ini persis yang diteorikan (McDonnell et al., 2021), dan alokasi order yang opak menjadikan algoritma sebagai medan kontrol yang diperebutkan (Kellogg et al., 2020). Posisi: data memperkuat tesis McDonnell friksi antara klaim "mitra otonom" dan kontrol korporasi tak terselesaikan secara internal, sehingga meledak sebagai protes massal sepanjang 2025.

Kemunculan Logika Religius-Komunal

Logika ketiga benar-benar teramati, tetapi terlokalisasi pada platform syariah, bukan pada platform arus utama. Zendo (Serikat Usaha Muhammadiyah) memosisikan layanan pada nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian, dengan rekrutmen berbiaya masuk rendah (Kalsel Pos, 2025). Ojesy dan Shejek ojek syariah khusus perempuan mensyaratkan pengemudi muslimah berhijab dan izin mahram, dengan motif menghindari khalwat (Tirto.id, 2018) (Kumparan, 2019). Yang paling tajam: platform syariah ini memakai bagi hasil 90% pengemudi / 10% aplikator (Tirto.id, 2018), kontras dengan potongan arus utama 20–70%. Ini bukti empiris logika religius-komunal (nilai + komunitas/dakwah) yang dapat dibandingkan dengan kerangka maqāṣid (Ishak et al., 2025) dan dengan kerentanan platform arus utama (Kamim & Khandiq, 2019). Posisi (temuan yang diperhalus): logika religius bersifat integratif di platform syariah (tertanam dalam rekrutmen, bagi hasil, dan misi), tetapi absen atau sekadar instrumental di platform arus utama (Grab/Maxim membingkai potongan sebagai asuransi/operasional, bukan nilai religius). Jadi, "logika ketiga" nyata, namun tersegregasi ke ceruk syariah dan belum terintegrasi ke pemain dominan. Ko-okurensi A8 dengan A6/A7 nyaris nol (Tabel 2) menguatkan pembacaan segregasi ini.

Tabel 2.
Ko-okurensi terpilih

	A8 Religius	B5 māl	C6 agensi
A6 Pasar	~0	3	3
A7 Korporasi	~0	4	3
B5 māl	1	—	3

Temuan: $A8 \times A6 / A7 \approx 0 \rightarrow$ logika religius tersegregasi ke platform syariah, bukan terintegrasi di arus utama. $B5 \times C1 / C6$ tinggi \rightarrow keluhan pendapatan mengkrystal jadi wacana ketidakadilan dan aksi kolektif.

Evaluasi Maqāṣid atas Desain Organisasi

Pemetaan korpus ke lima keniscayaan menunjukkan māl paling jelas terkikis, nafs terkikis dengan perlindungan parsial, *nasl/ 'ird* ambivalen, dīn terlindungi hanya di ceruk syariah, dan 'aql terkikis (lihat Tabel 3).

Table 3.
Distribusi valensi maqāṣid

Keniscayaan Melindungi Mengikis Ambivalen				Catatan
Dīn	3	0	0	hanya ceruk syariah; tak dibahas arus utama
Nafs	1	3	1	asuransi/BPJS vs kondisi tak layak
'Aql	0	3	0	aturan opak
Nasl/'Ird	2	1	1	keamanan perempuan vs banding lemah

Keniscayaan Melindungi Mengikis Ambivalen				Catatan
Māl	2	6	1	90/10 & Perpres 92% vs potongan 20–70%

Perlindungan dan Erosi Lima Keniscayaan

Pada konteks *Hifzbul māl* [mengikis], yang mengikis, potongan 20–70% dan penyusutan pendapatan mendominasi (Tempo, 2025b); (Kompas TV, 2025) sebaliknya, bagi hasil 90/10 di platform syariah seharusnya melindungi (Tirto.id, 2018). Pada nafs [ambivalen→membaik], keluhan kondisi kerja tidak layak dan jam panjang (Tempo, 2025a) sebagian dijawab oleh kewajiban asuransi dan BPJS dalam Perpres 27/2026 (Berita Jatim, 2026). Pada *nasl/ ird* [ambivalen], mekanisme banding 14 hari tersedia tetapi diajukan ke platform yang sama tanpa pihak ketiga independen (Berita Jatim, 2026), sementara platform syariah justru menjaga martabat dan keamanan perempuan [melindungi] (Kumparan, 2019). Pada *dīn* [melindungi hanya ceruk], penghindaran khalwat dan busana syar'i difasilitasi platform syariah (Tirto.id, 2018), namun tak tersentuh di arus utama. Pada *'aql* [mengikis], aturan tarif/potongan yang berubah dan kurang transparan menyulitkan keputusan terinformasi (Tempo, 2025a) (Berita Jatim, 2026). Posisi: data media mengonfirmasi sekaligus memperinci pemetaan konseptual Ishak dkk. (Ishak et al., 2025) menambahkan angka *māl* yang konkret dan problem "banding ke platform yang sama". Erosi *māl* dan nafs ini adalah wujud empiris keprekariatan (Standing, 2011) yang, dalam kerangka sistem maqāṣid (Auda, 2008b), menandai kegagalan perlindungan keniscayaan pokok.

Identitas Keislaman, Keadilan, dan Konstruksi Loyalitas

Identitas religius muncul kuat di level platform/pendiri (misi platform syariah), tetapi tipis di level wacana pekerja dalam pemberitaan. Kode dominan di level pekerja adalah agensi kolektif (C6).

Identitas Religius sebagai Holding Environment

Bukti di media tipis. Motivasi pengemudi platform syariah membantu sesama muslimah, kerangka dakwah dan amaliyah (Radar Solo (Jawa Pos), 2024) mengisyaratkan identitas religius-komunal sebagai sumber makna, sejalan dengan konsep *holding environment* (Petriglieri et al., 2019). Namun, wacana religius pekerja platform arus utama tidak terlihat dalam pemberitaan.

Wacana Keadilan dan Niat Bertahan atau Keluar

Keadilan yang dikeluhkan bersifat distributif (bagi hasil timpang) dan prosedural (regulasi tak ditegakkan, banding ke platform yang sama), bukan interaksional (Tempo, 2025a). Agensi kolektif (C6) sangat intens: demo berulang, off-bid massal, dan serikat (Garda, SPAI, Sepoi) pola yang cocok dengan tipologi agensi pekerja gig Indonesia (Permana et al., 2026). Loyalitas-exit (C3) hadir secara diskursif: narasi kekecewaan ("dulu tergiur penghasilan besar, kini terseok-seok") dan ancaman bertindak bila tuntutan diabaikan (Kompas.com, 2025) dibandingkan dengan dinamika loyalitas komunitas daring (Perbawani & Nuralin, 2021). Posisi: keluhan keadilan didominasi oleh dimensi distributif dan prosedural; ini wacana, bukan retensi perilaku.

Tabel 4.
Integrasi temuan literatur

Temuan korpus	Selaras/Berbeda	Sumber pembanding
Ketegangan "mitra otonom" vs kontrol korporasi memicu protes	Selaras & memperkuat	McDonnell dkk. (2021); Meijerink & Keegan (2019)
Logika religius nyata tetapi tersegregasi ke platform syariah	Memperhalus (bukan sekadar konfirmasi)	Ishak dkk. (2025); Kamim & Khandiq (2019)
Erosi <i>māl</i> konkret + banding ke platform sama	Memperinci pemetaan konseptual	Ishak dkk. (2025); Auda (2008)

Temuan korpus	Selaras/Berbeda	Sumber pembanding
Agensi kolektif dominan; loyalitas bersifat diskursif	Selaras	Permana dkk. (2023); Perbawani & Nuralin (2021)

Integrasi temuan literatur pada tabel 4 menunjukkan bahwa penelitian ini lebih banyak memperkuat literatur terdahulu dibandingkan membantahnya. Namun demikian, terdapat dua kontribusi konseptual yang menonjol. Pertama, penelitian ini memperlihatkan bahwa logika religius-komunal bukan sekadar hadir sebagai nilai normatif, tetapi beroperasi sebagai logika institusional yang terlokalisasi pada platform syariah sehingga belum berintegrasi dengan tata kelola platform arus utama. Kedua, evaluasi maqāṣid menghasilkan bukti empiris yang lebih konkret mengenai erosi perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) serta lemahnya mekanisme banding, sehingga memperkaya pemetaan konseptual yang sebelumnya masih bersifat normatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori HRM algoritmik dalam konteks masyarakat Muslim sekaligus memperluas penerapan teori logika institusional pada ekonomi platform di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menelaah bagaimana platform digital di Indonesia mengorganisir tenaga kerja gig Muslim di tengah tarikan logika pasar, korporasi, dan religius, serta menilai desain organisasi itu melalui lensa maqāṣid. Berdasarkan analisis isi pemberitaan media 2024–2025 dan dokumen kebijakan, tata kelola kerja gig pada platform arus utama didominasi struktur biaya algoritmik dan pembingkai "kemitraan" yang dikontestasi secara terbuka tampak dari potongan riil yang jauh melampaui batas regulasi dan dari gelombang aksi kolektif sepanjang 2025. Logika pasar yang menekankan otonomi-fleksibilitas berjalan beriringan dengan logika korporasi yang menuntut kontrol dan capaian, dan ketegangan keduanya tidak terselesaikan secara internal melainkan meluap menjadi protes berulang.

Temuan paling menonjol menyangkut status logika religius-komunal. Logika ini nyata, tetapi berbeda dari dugaan awal bahwa ia akan menyatu ke dalam desain platform dominan ia terlokalisasi pada platform syariah seperti Zendo, Ojesy, dan Shejek, yang menanamkan nilai keislaman ke dalam rekrutmen, menerapkan bagi hasil yang lebih berpihak kepada pengemudi, dan mengusung misi komunitas; sementara platform arus utama membingkai kesejahteraan secara instrumental tanpa rujukan pada nilai religius. Dengan demikian, kontribusi teoretis penelitian ini bukan sekadar menambahkan "logika ketiga" pada kerangka logika institusional yang bersaing, melainkan menunjukkan bahwa logika tersebut saat ini tersegregasi ke ceruk dan belum terintegrasi ke arus utama sebuah penghalusan yang berimplikasi pada bagaimana keadilan religius dapat diperjuangkan dalam ekonomi platform.

Dalam evaluasi maqāṣid, perlindungan harta paling banyak terkikis, diikuti perlindungan jiwa dan akal, sedangkan perlindungan agama dan martabat hanya terpenuhi pada ceruk syariah. Pada sisi pekerja, keadilan yang dikeluhkan didominasi dimensi distributif dan prosedural, agensi kolektif menjadi respons yang paling menonjol, dan loyalitas hadir sebagai konstruksi diskursif alih-alih perilaku. Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi sekaligus memperinci pemetaan konseptual terdahulu dan memberi wujud empiris pada keprekarian pekerja platform di Indonesia.

Penelitian ini dibatasi oleh sifat korpusnya. Analisis isi pemberitaan bersifat purposif dan unggul menangkap lapis kebijakan, regulasi, dan wacana publik, tetapi lemah menangkap pemaknaan batin pekerja khususnya peran identitas religius sebagai penopang stabilitas kerja sehingga klaim pada ranah itu bersifat awal dan perlu diperlakukan dengan hati-hati. Karena itu, penelitian lanjutan disarankan menempuh netnografi komunitas pengemudi serta wawancara mendalam untuk menguji apakah identitas keislaman sungguh berfungsi sebagai holding environment yang membentuk loyalitas; membandingkan secara langsung strategi manajemen

sumber daya manusia antara platform syariah dan arus utama; dan menelusuri prasyarat yang memungkinkan logika religius berpindah dari ceruk menuju integrasi pada pemain dominan. Rancangan longitudinal akan memperkuat klaim mengenai dampak strategi terhadap retensi dan kesejahteraan pengemudi dalam jangka panjang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Profesor Muchlis Bahsar dan Profesor Zainal Arifin selaku Dosen Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, serta dukungan istri penulis yang memungkinkan terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2008a). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Auda, J. (2008b). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Berita Jatim. (2026). *Ojol Masih Menunggu Bukti yang Dijanjikan*. <https://beritajatim.com/ojol-masih-menunggu-bukti-yang-dijanjikan>
- Cameron, L. D. & Rahman, H. (2022). Expanding the Locus of Resistance: Understanding the Co-Constitution of Control and Resistance in the Gig Economy. *Organization Science*, 33(1), 38–58. <https://doi.org/10.1287/orsc.2021.1557>
- CNN Indonesia. (2025). *Ojol Gelar Demonstrasi Hari Ini, Bawa 3 Tuntutan ke Pemerintah*. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20250227102412-579-1202984/ojol-gelar-demonstrasi-hari-ini-bawa-3-tuntutan-ke-pemerintah>
- Duggan, J., Carbery, R., McDonnell, A. & Sherman, U. (2023). Algorithmic HRM Control in the Gig Economy: The App-Worker Perspective. *Human Resource Management*, 62(6), 883–899. <https://doi.org/10.1002/hrm.22168>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Irwanto & Hariatiningsih, R. L. (2020). Penggunaan Skincare dan Penerapan Konsep Beauty 4.0 pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram). *Jurnal Komunikasi*, 11(2). <https://doi.org/10.31294/jkom.v11i2.8366>
- Ishak, A. H., Mohamad, S. N. M., Ismail, A. T., Abd Latib, N. A. & Sahari, N. H. (2025). Analysing the Contemporary Essentials of Sustainable Gig Economy Workforce from the Lenses of Maqasid Shariah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 24(1), 491–528. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss1.art14>
- Kalsel Pos. (2025). *Muhammadiyah Hadirkan Ojek Online Zendo Berbasis Syariah*. <https://kalselpos.com/2025/01/08/muhammadiyah-hadirkan-ojek-online-zendo-berbasis-syariah/>
- Kamim, A. B. Muh. & Khandiq, M. R. (2019). Gojek dan Kerja Digital: Kerentanan dan Ilusi Kesejahteraan yang Dialami oleh Mitra Pengemudi dalam Kerja Berbasis Platform Digital. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 59–73. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.45240>
- Kellogg, K. C., Valentine, M. A. & Christin, A. (2020). Algorithms at Work: The New Contested Terrain of Control. *Academy of Management Annals*, 14(1), 366–410. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0174>
- Kompas TV. (2025). *Tentang Aksi Pengemudi Ojol 20 Mei 2025: Tuntutan, Lokasi, serta Respons Aplikasi*. <https://www.kompas.tv/nasional/594327/tentang-aksi-pengemudi-ojol-20-mei-2025-tuntutan-lokasi-serta-respons-aplikator>
- Kompas.com. (2025). *Demo Ojol Sepanjang 2025: Dari Soal Potongan Aplikasi hingga THR*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/07/21/21031501/demo-ojol-sepanjang-2025-dari-soal-potongan-aplikasi-hingga-thr>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

- Kumparan. (2019). *Ojek Muslimah Ojesy Punya 600 Driver Berhijab di 25 Kota Indonesia*. <https://kumparan.com/kumparantech/ojek-muslimah-ojesy-punya-600-driver-berhijab-di-25-kota-indonesia>
- McDonnell, A., Carbery, R., Burgess, J. & Sherman, U. (2021). Technologically Mediated Human Resource Management in the Gig Economy. *The International Journal of Human Resource Management*, 32(19), 3995–4015. <https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1986109>
- Meijerink, J. & Keegan, A. (2019). Conceptualizing Human Resource Management in the Gig Economy: Toward a Platform Ecosystem Perspective. *Journal of Managerial Psychology*, 34(4), 214–232. <https://doi.org/10.1108/JMP-07-2018-0277>
- Perbawani, P. S. & Nuralin, A. J. (2021). Hubungan Parasosial dan Perilaku Loyalitas Fans dalam Fandom KPop di Indonesia. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 42–54. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3056>
- Permana, M. Y., Izzati, N. R. & Askar, M. W. (2023). Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 21(3), 339–358. <https://doi.org/10.12695/jmt.2022.21.3.7>
- Permana, M. Y., Izzati, N. R. & Askar, M. W. (2026). A Typology of Labour Agency in the Gig Economy: Gig Drivers' Experiences of Struggle in Indonesia During the COVID-19 Pandemic. *New Technology, Work and Employment*. <https://doi.org/10.1111/ntwe.70014>
- Permassanty, T. D. & Muntiani, M. (2018). Strategi Komunikasi Komunitas Virtual dalam Mempromosikan Tangerang melalui Media Sosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 21(2), 173–186. <https://doi.org/10.20422/jpk.v21i2.523>
- Petriglieri, G., Ashford, S. J. & Wrzesniewski, A. (2019). Agony and Ecstasy in the Gig Economy: Cultivating Holding Environments for Precarious and Personalized Work Identities. *Administrative Science Quarterly*, 64(1), 124–170. <https://doi.org/10.1177/0001839218759646>
- Prajarto, N. (2018). Netizen dan Infotainment: Studi Etnografi Virtual pada Akun Instagram @lambe_turah. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 33–46. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1367>
- Radar Solo (Jawa Pos). (2024). *Fachry Sofyan, Penggagas Ojek Muslim, Mudahkan Muslimah Bepergian tanpa Langgar Syariah*. <https://radarsolo.jawapos.com/features/844892070/fachry-sofyan-penggagas-ojek-muslim-mudahkan-muslimah-bepergian-tanpa-langgar-syariah>
- Saldana, J. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.
- Tempo. (2025a). *Ojol Mogok Besok, Tuduh Aplikator Langgar Peraturan Menteri*. <https://www.tempo.co/hukum/ojol-mogok-besok-tuduh-aplikator-langgar-peraturan-menteri--1483885>
- Tempo. (2025b). *Potongan Aplikasi 20 Persen Jadi Sumber Keberatan Driver Ojol*. <https://www.tempo.co/ekonomi/potongan-aplikasi-20-persen-jadi-sumber-keberatan-driver-ojol-1533796>
- Tirto.id. (2018). *Shejek Ojek Muslimah: Pengguna Mesti Antre karena Permintaan Tinggi*. <https://tirto.id/shejek-ojek-muslimah-pengguna-mesti-antre-karena-permintaan-tinggi-daRL>.